BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang terjalin antara dua individu lawan jenis sehingga tercipta hubungan hukum. Ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.¹ Perkawinan dilaksanakan melalui proses yang disebut upacara pernikahan yang dimana dihadiri oleh mempelai pria beserta wali yang merupakan pihak laki laki dari mempelai wanita²

Perkawinan seharusnya dapat menjadi tempat dukungan emosional, kebahagiaan dan stabilitas bagi pasangan. Namun dalam banyak kasus, perkawinan menghadapi masalah jangka panjang yang seringkali berujung pada perceraian. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi, seperti pergeseran nilai tradisional menuju gaya hidup yang lebih individualistis, turut mempengaruhi cara pasangan memandang dan menjalani pernikahan. Tekanan ekonomi yang semakin berat, termasuk tingginya biaya hidup, ketidakstabilan pekerjaan, dan tuntutan finansial, seringkali menjadi faktor pemicu konflik rumah tangga yang signifikan.

¹ Sofiawati, E., & Suhada, D. (2024). Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam. *Masagi*, 3(1), Hlm. 2

² Anggriawan, T. P., Purwanto, A. M. D. C., & Wardhani, S. K. (2023). *Pengantar Hukum Perdata*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA. Hlm. 306

Perceraian merupakan suatu proses hukum yang menandai berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara dua orang.³ Dalam kerangka hukum, perceraian bukan hanya sekedar berakhirnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perceraian dapat dikabulkan oleh pengadilan yang bertugas mengambil keputusan yang sah dan adil mengenai sifat perkawinan.

Faktor perceraian banyak terjadi karena ketidakmampuan pasangan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Perceraian tersebut dapat muncul akibat ketidakcocokan, kurangnya komunikasi, atau permasalahan ekonomi. Ketika salah satu pihak merasa tidak lagi mendapatkan dukungan dari pasangannya, atau ketika konflik tidak dapat diselesaikan secara efektif, maka perceraian sering dijadikan jalan keluarnya.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, ada banyak bentuk perceraian di Indonesia. Memahami aspek-aspek perceraian ini penting untuk memahami kesulitan dan kekuatan hubungan antara suami dan istri, serta implikasi sosial dan hukum yang menyertainya. Berikut ini adalah beberapa jenis perceraian yang terjadi di Indonesia.⁵

³ Dahwadin, E. I. S., Sofiwati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1). Hlm. 89

⁴ *Ibid*

⁵ Wulandari, D. (2021). *Pelaksanaan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Hlm. 14

Cerai Talak adalah jenis perceraian yang mengharuskan suami untuk mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Menurut hukum Islam, suami mempunyai hak untuk meminta cerai sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri perkawinan. Pengadilan mempertimbangkan permohonan cerai, mendengarkan dalil-dalil kedua belah pihak, dan memutuskan apakah perceraian dikabulkan atau tidak.⁶

Cerai Gugat adalah salah satu jenis perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan. Dalam hal ini istri meminta cerai karena beberapa alasan seperti ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan keluarga. Prosesnya juga mencakup mediasi untuk menyelesaikan perselisihan sebelum pengadilan mengambil keputusan akhir.⁷

Di era zaman sekarang, perceraian menjadi semakin umum dan dijadikan solusi oleh pasangan yang memiliki hubungan tidak harmonis lagi. Meskipun demikian, perceraian tetap merupakan proses yang panjang dan rumit, dengan konsekuensi yang tidak hanya sekedar perpisahan hubungan dua pasangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perceraian, tidak hanya sebagai fenomena hukum, namun juga sebagai peristiwa sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, ekonomi, dan budaya

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur terkait lembaga negara di bidang penegakan hukum dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang beragama islam, yaitu Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Mojokerto berfungsi sebagai lembaga peradilan yang

⁶ *Ibid* hlm. 15

⁷ Syaifuddin M, Turatmiyah S, & Yahanan A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika. Hlm. 7

memiliki kewenangan untuk menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, khususnya perkara perceraian. Perceraian, merupakan suatu proses hukum yang diajukan oleh salah satu pihak (gugat) atau kedua belah pihak (permohonan) kepada majelis hakim untuk mendapatkan putusan resmi mengenai pemutusan ikatan pernikahan.

Selama periode empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024, Pengadilan Agama Mojokerto telah mencatat dan menerima sejumlah perkara perceraian yang mencakup dua kategori utama, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merujuk pada situasi di mana salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian, sedangkan cerai talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan talak kepada istri. Berikut merupakan data perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto selama periode empat tahun terakhir (2021-2024) :

Tahun	Jenis Perkara		Jumlah
	Cerai Gugat	Cerai Talak	
2021	2.536	874	3.410
2022	2.568	849	3.417
2023	2.314	798	3.112
2024	2.463	761	3.224

Tabel 1. Perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2021-2024

Sumber : <https://pa-mojokerto.go.id/>

Terkait data diatas Pengadilan Agama Mojokerto menerima perkara cerai gugat dan cerai talak setiap tahunnya adalah sebanyak 3000 kasus. Data mengenai jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Mojokerto selama periode tersebut sangat penting untuk dianalisis, karena

dapat memberikan gambaran mengenai tren dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Peningkatan atau penurunan jumlah perkara perceraian dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti perubahan norma sosial, kondisi ekonomi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam berkeluarga.

Narapidana, sebagai contoh bentuk individu yang sedang menjalani hukuman penjara dan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kehidupan pribadi dan sosial mereka, termasuk dalam hubungan perkawinan. Ketika seorang suami menjadi tahanan, banyak aspek kehidupannya yang terganggu, termasuk ikatan emosional dan tanggung jawab kepada keluarga. Dalam pelaksanaan perkara perceraian, suami yang berstatus narapidana menghadapi tantangan tersendiri, seperti keterbatasan akses ke pengadilan, permasalahan komunikasi dengan keluarga atau kuasa hukum, serta potensi terabaikannya hak-hak keperdataan seperti hak atas pembelaan, hak untuk didengar, hak atas harta bersama, dan hak asuh anak.

Proses hukum yang rumit dan terbatasnya akses terhadap fasilitas hukum menyulitkan para suami yang berstatus narapidana untuk ikut serta dalam proses perceraian. Apabila mereka berhalangan hadir dalam sidang pengadilan, maka akan diambil keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan dan haknya. Kurangnya komunikasi antara suami yang berstatus narapidana dengan istrinya memperburuk situasi dan meningkatkan jarak emosional. Selain itu, stigma sosial terhadap narapidana menjadi alasan utama perpisahan mereka. Orang yang dipenjara dipandang negatif oleh masyarakat, sehingga memengaruhi cara pasangan memandang hubungan

mereka. Rasa malu dan tekanan sosial ini dapat memaksa pasangan untuk mengakhiri hubungan mereka meskipun sebelumnya mereka memiliki hubungan yang kuat.⁸

Faktor ekonomi juga sama pentingnya. Narapidana yang kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan saat menjalani hukuman meninggalkan beban pasangannya untuk mengurus keuangan rumah tangga sendirian. Ketidakstabilan keuangan ini dapat menambah tekanan pada hubungan dan bahkan dapat menyebabkan perceraian.⁹

Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam perkara perceraian telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pengadilan Agama diharapkan mampu memberikan akses keadilan yang setara, termasuk melalui mekanisme khusus seperti sidang jarak jauh atau pemberian kuasa hukum yang memadai.¹⁰ Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan dalam implementasi perlindungan tersebut, sehingga perlunya kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan hak bagi suami berstatus narapidana dalam perkara perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Mojokerto.¹¹

⁸ Mianita, H., Nurjannah, M., Bullah, M. F., Wicaksana, S., & Febi, T. (2020). Dampak stigmatisasi terhadap keluarga narapidana di lingkungan sekolah. *ResearchGate*. url : https://www.researchgate.net/publication/339127893_DAMPAK_STIGMATISASI_TERHADAP_KELUARGA_NARAPIDANA_DI_LINGKUNGAN_SEKOLAH

⁹ Arinda, F., & Rizkillah, R. (2023). Pengaruh tekanan ekonomi dan dukungan sosial terhadap ketahanan keluarga narapidana. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 10, 1-13. Hlm 4

¹⁰ Darsono. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama. *Badilag Mahkamah Agung RI*. Url: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-bagi-hak-hak-narapidana-dalam-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama>. Diakses pada 13 Juni 2025

¹¹ *Ibid*

Pengadilan Agama Mojokerto, sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam menangani perkara hukum keluarga, juga menerima kasus cerai gugat yang melibatkan narapidana sebagai tergugat. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat status narapidana dapat mempengaruhi dinamika dan proses hukum dalam pengajuan perceraian. Selama penulis melakukan prapenelitian, ditemukan bahwa jumlah kasus cerai gugat yang melibatkan narapidana dari tahun 2021 hingga Juli 2024 menunjukkan pola yang signifikan, yang penting untuk dianalisis guna memahami dampak status narapidana terhadap hubungan perkawinan. Berikut adalah data yang diperoleh penulis :

Tahun	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021	1				2				1	2		1
2022		1		4	1					2		
2023	1	1					1			1		
2024	1		1	1	2		1					

Tabel 2. Perceraian Narapidana

Sumber : Staff Pranata Komputer Pengadilan Agama Mojokerto

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel yang disediakan, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Mojokerto menerima sejumlah kasus cerai gugat yang melibatkan narapidana sebagai tergugat. Hal ini

menunjukkan bahwa lembaga peradilan ini tidak hanya berfungsi untuk menangani perkara-perkara yang melibatkan individu yang bebas, tetapi juga memberikan akses keadilan bagi mereka yang sedang menjalani hukuman penjara. Sebagai orang yang menjalani hukuman penjara, narapidana tetap memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Namun dalam praktiknya hak-hak ini tidak sepenuhnya ditegakkan, sehingga menghilangkan kesempatan narapidana untuk ikut serta dalam proses perceraian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem hukum. Salah satu hak asasi manusia terpenting bagi narapidana adalah hak atas persamaan di depan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hak-hak narapidana khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, termasuk hak atas peradilan yang adil dan hak untuk menyatakan pendapat secara sah, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.¹² Namun, hak-hak ini seringkali terabaikan ketika narapidana tidak dapat menghadiri proses perceraian. Oleh karena itu, hak-hak yang ditetapkan dalam undang-undang bukan sekedar ketentuan hukum, melainkan jaminan bahwa setiap orang akan mendapat perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan.

Mendukung hak-hak ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan terinformasi serta menjamin martabat dan kesejahteraan semua orang, termasuk mereka yang terjebak dalam sistem

¹² *Ibid*

peradilan. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas penulis ingin meneliti isu tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK BAGI SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO (Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.MR)”**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini penulis memberikan rumusan masalah berupa :

1. Bagaimana penerapan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan implikasi hukumnya dalam perkara perceraian suami yang berstatus Narapidana di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Bagaimana permasalahan dan solusi dalam perkara perceraian suami yang berstatus narapidana di Pengadilan Agama Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis penerapan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasarakatan dan implikasinya dalam perkara perceraian suami yang berstatus Narapidana di Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Untuk menganalisis permasalahan dan solusi dalam perkara perceraian suami yang bersatus Narapidana di Pengadilan Agama Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Manfaat Akademisi

Skripsi ini dapat membantu mahasiswa dan praktisi hukum untuk memahami proses dan pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam kasus perceraian, terutama dalam kasus seorang tergugat atau termohon yang sedang menjalani hukuman penjara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian ini bagi praktisi adalah :

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak- pihak yang berkepentingan.
- b. Menambah referensi bagi mahasiswa dalam bidang hukum yang ingin melaksanakan penelitian yang serupa.
- c. Memenuhi syarat kelulusan penulis program studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil riset oleh penulis dalam mencari penelitian terdahulu serta pembahasan terkait perlindungan hak narapidana dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto guna menemukan perbedaan serta persamaan dengan fokus bahasan penelitian penulis. Terdapat 3 penelitian terdahulu yang akan penulis sajikan antara lain sebagai berikut :

No.	Penelitian Sebelumnya	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami Yang Di Penjara Di Pengadilan Agama Wates Studi atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Wt (Renata Novita Idris, Skripsi,2024) ¹³	Isu hukum yang diangkat sama sama mengenai perceraian seorang narapidana dan sama sama menggunakan metode empiris untuk menyelesaikan skripsinya.	Rumusan masalah dan Lokasi penelitian dari skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis.
2.	Ketiadaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Berstatus Narapidana Analisis Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor : 418/Pdt.G/2021/PA.Brb (Noor Hafizah, Skripsi, 2021) ¹⁴	PERMA yang digunakan sama dengan skripsi penulis	Rumusan masalah, metode penelitian, dan lokasi penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis
3.	Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies (Royyan Mahmuda Al'Arisyi Daulay, Shinta Dewi	Klausa yang digunakan dalam jurnal tersebut sama yaitu mencari keadilan untuk hak narapidana yang hilang	Lokasi penelitian dan isi pembahasan dalam jurnal tersebut berbeda dengan skripsi peneliti

¹³ Idris, R. N. (2024). *Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami yang di Penjara di Pengadilan Agama Wates (Studi atas Perkara Nomor 61/Pdt. G/2023/PA. Wt)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹⁴ Hafizah, N. (2023). *Ketiadaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Berstatus Narapidana (Analisis Putusan Nomor: 418/Pdt. G/2021/PA. Brb)*.

	Rismawati, Maghfur, Jurnal,2023) ¹⁵		
--	---	--	--

Tabel 3. Keaslian Penelitian

Berdasarkan data tabel yang telah disajikan, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara subjek perkara, objek perkara, dan tempat penelitian dengan fokus utama dalam skripsi ini. Subjek perkara dalam penelitian sebelumnya mungkin melibatkan pihak-pihak yang berbeda, seperti pasangan yang tidak berstatus narapidana atau pihak yang memiliki kondisi sosial dan hukum yang lebih umum. Sementara dalam penelitian ini, subjek perkara berfokus secara khusus pada suami yang berstatus narapidana yang sedang menjalani masa pidana di LAPAS dan tempat penelitian di Pengadilan Agama Mojokerto.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dengan metode empiris. Penelitian dengan menggunakan metode empiris adalah suatu metode dengan model penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum

¹⁵ Daulay, R. M. A. A., Rismawati, S. D., & Ahmad, M. (2023). Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 1-13.

bekerja secara nyata di suatu lingkungan masyarakat.¹⁶

Metode penelitian empiris yang akan digunakan dalam studi ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam mengenai perlindungan hak narapidana dalam proses perceraian. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi oleh narapidana pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk mengeksplorasi isu-isu hukum dalam kehidupan nyata.¹⁷

Penelitian metode empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik, serta bagaimana masyarakat berinteraksi dengan norma-norma hukum yang ada.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika antara hukum dan masyarakat, khususnya perlindungan hak narapidana dalam proses perceraian. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh narapidana ketika berusaha untuk mengakses hak-hak mereka dalam situasi yang rumit ini.

¹⁶ Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media. Hlm 14

¹⁷ Munir Fuady. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajawali Pers. Hlm.121

¹⁸ Qamar, N. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 22(1), 67-71. Hlm 68

Metode empiris yang akan digunakan dalam studi ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam mengenai perlindungan hak narapidana dalam proses perceraian. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi oleh narapidana yang digugat cerai.¹⁹ Dengan menggunakan wawancara dan observasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih kaya dan kontekstual, yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga faktor sosial, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi situasi narapidana. Pendekatan kualitatif ini sangat penting untuk memahami nuansa dan kompleksitas yang sering kali tidak dapat ditangkap oleh metode kuantitatif.²⁰

Penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi masalah yang ada, tetapi juga akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi untuk lebih baik melindungi hak-hak narapidana. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada bukti untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana.²¹ Dengan fokus pada pengalaman nyata dan tantangan yang

¹⁹ Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Hlm.106

²⁰ *Ibid.* Hlm. 105

²¹ Universitas Lampung. (2019). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Hlm. 2

dihadapi oleh narapidana, penelitian ini bersolusi untuk memberikan suara kepada mereka yang sering kali terpinggirkan dalam proses hukum, serta mendorong perubahan yang lebih adil dan manusiawi dalam sistem peradilan.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian hukum empiris merupakan metode yang berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma atau aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang mencerminkan perilaku, interaksi, dan dinamika Masyarakat.²² Untuk memecahkan permasalahan hukum dalam suatu penelitian diperlukan pendekatan-pendekatan sebagai dasar penulisan penelitian, maka dari itu penulis menggunakan pendekatan, antara lain :

1. Pendekatan struktural adalah suatu metode atau cara pandang dalam memahami bekerjanya hukum di masyarakat dengan menitikberatkan pada struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.²³ Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan norma atau aturan tertulis, melainkan juga dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, di mana setiap unsur masyarakat memiliki peran, fungsi, dan kedudukan yang saling berkaitan. Struktur masyarakat

²² Nugroho, S. S. (2022). *Metodologi Riset Hukum*. Universitas Merdeka Madiun. Hlm 43

²³ Irwansyah. (2023). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mitra Buana Media. Yogyakarta. Hlm 206

terdiri dari berbagai elemen seperti lembaga-lembaga sosial, status, peranan, norma, dan nilai-nilai yang membentuk pola hubungan antarindividu maupun kelompok. Setiap elemen ini berinteraksi dan berkontribusi dalam menciptakan keteraturan, ketertiban, serta keseimbangan sosial. Pendekatan struktural menyoroti bahwa hukum akan berjalan efektif apabila didukung oleh struktur sosial yang baik dan terorganisasi. Jika struktur sosial dalam masyarakat berantakan, maka pelaksanaan hukum pun menjadi tidak optimal, karena individu atau kelompok tidak dapat menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh norma hukum. hukum dipandang sebagai salah satu subsistem dari sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi dengan subsistem lain, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Oleh sebab itu, efektivitas hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana struktur-struktur sosial tersebut bekerja dan saling menopang. Menurut para ahli seperti Talcott Parsons dan Emile Durkheim, struktur sosial berfungsi sebagai kerangka yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, menentukan status, peranan, serta distribusi hak dan kewajiban. Hukum berperan sebagai alat yang menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial, sekaligus menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan di antara anggota masyarakat.²⁴

²⁴ *Ibid*

2. Pendekatan *Interdisipliner (Interdisciplinary Approach)* adalah metode pemecahan masalah yang menggabungkan berbagai sudut pandang dari ilmu-ilmu serumpun yang relevan secara terpadu untuk mendapatkan pemahaman dan solusi yang lebih komprehensif.²⁵ Dalam pendekatan ini, tidak cukup hanya melihat masalah dari satu disiplin ilmu saja, melainkan diperlukan integrasi konsep, teori, metode, dan analisis dari beberapa bidang ilmu yang saling terkait. Pendekatan *interdisipliner* menekankan kolaborasi aktif dan saling mempengaruhi antarilmu. Proses ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide, sintesis teori, dan pengembangan metode baru yang lebih efektif dalam menjawab tantangan-tantangan kompleks di masyarakat. Pendekatan *interdisipliner* sangat bermanfaat di era modern yang penuh dengan masalah-masalah kompleks, seperti perubahan sosial, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu saja. Melalui integrasi pengetahuan, pendekatan ini dapat memunculkan inovasi, kreativitas, dan solusi yang lebih efektif serta berkelanjutan. Kolaborasi antarilmuwan dari berbagai latar belakang keilmuan juga memperkaya proses analisis dan memperluas wawasan dalam memahami akar permasalahan. Selain itu, pendekatan *interdisipliner* juga mendorong keterbukaan berpikir dan fleksibilitas dalam penelitian maupun

²⁵ *Ibid*, Hlm. 208

praktik pemecahan masalah. Para ahli dituntut untuk mampu memahami dan mengapresiasi cara pandang disiplin lain, sehingga tercipta sinergi yang produktif.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis bahan hukum sebagai bahan dalam menjawab isu hukum penelitian penulis, dengan menggunakan penelitian empiris. Bahan hukum utama yang akan digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer.²⁶ Bahan hukum yang termasuk primer adalah observasi dan wawancara sedangkan bahan sekunder terdiri dari dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian yang berbentuk laporan lainnya. Berikut adalah beberapa kategori bahan hukum, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang sangat penting karena bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam menganalisis masalah hukum yang diteliti. Bahan hukum utama misalnya undang-undang yang menjadi bahan hukum primer akan dianalisis kesesuaiannya dengan fakta lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau survei. Bahan hukum utama penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu wawancara dan observasi.

²⁶ Mahmud, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Revisi ed.)*. Jakarta: Kencana. Hlm. 137

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi berfungsi sebagai penjelasan, pelengkap, dan pendukung terhadap bahan hukum primer dalam penelitian hukum. Bahan ini biasanya berupa karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, pendapat para ahli atau sarjana hukum, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu:

- a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c.) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- g.) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- h.) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat non-hukum dan berfungsi sebagai pelengkap serta memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam suatu penelitian hukum. Bahan ini membantu peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan isi bahan hukum utama dengan lebih baik, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih mendalam dan terarah. Contoh bahan hukum tersier yang sering digunakan antara lain kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif, artikel berita, sumber dari internet, serta media sosial

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum akan dilakukan melalui beberapa prosedur, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan salah satu majelis hakim yang pernah memutus kasus perceraian suami berstatus naapidana, petugas PTSP yang melayani dan menerima berkas perkara, Panitera Muda Pengadilan Agama Mojokerto, dan salah satu narapidana yang menjadi tergugat dalam kasus

perceraian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka mengenai hak- hak narapidana dalam proses perceraian.

b. Observasi

Peneliti akan melakukan observasi di Pengadilan Agama Mojokerto untuk memahami dinamika interaksi antara narapidana dan pihak berwenang pada kasus perceraian. Observasi ini juga akan membantu peneliti untuk melihat langsung bagaimana proses hukum dijalankan.

c. Studi Dokumen

Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan perceraian narapidana, termasuk putusan pengadilan, surat permohonan perceraian, dan dokumen lain yang relevan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui wawancara dan observasi akan dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan bahan hukum secara mendalam dan komprehensif dalam bentuk narasi atau kalimat. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data yang diperoleh dari lapangan, khususnya terkait permasalahan hukum yang sedang diteliti. Peneliti akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan bahan hukum secara sistematis, kemudian melakukan analisis deskriptif untuk mengaitkan temuan lapangan dengan

permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Mojokerto menjadi sumber utama untuk menggambarkan kondisi nyata yang dialami oleh narapidana dalam proses perceraian.

Penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, studi pustaka, dan literatur relevan lainnya yang berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif. Kombinasi antara bahan empiris dari lapangan dan bahan hukum sekunder ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan komprehensif mengenai situasi hukum yang dihadapi oleh narapidana, khususnya dalam hal hak dan masalah mereka saat menjalani proses perceraian. Analisis kualitatif yang dilakukan diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman hukum empiris di Indonesia.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan kerangka proposal skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari beberapa sub bab. Penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK BAGI SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

MOJOKERTO (Studi Putusan Nomor Perkara 852/Pdt.G/2024/PA.MR)” yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab yang disusun secara runtun dan sistematis sehingga setiap bab akan saling berkaitan. Berikut 4 bab yang akan penulis susun :

Bab Pertama, dalam penelitian ini akan membahas bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai fondasi awal untuk memahami keseluruhan isi skripsi. Pada bab ini, peneliti akan menyajikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai pokok permasalahan, yaitu tentang hak suami yang berstatus narapidana dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto. Pembahasan akan dimulai dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, dalam penelitian ini difokuskan untuk mengupas lebih dalam permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah pertama yaitu penerapan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Implikasinya dalam perkara perceraian suami berstatus narapidana di Pengadilan Agama Mojokerto. Pembahasan Bab Kedua ini dibagi ke dalam dua sub bab, yaitu sub bab pertama membahas penerapan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam perkara perceraian suami berstatus narapidana. Sub bab kedua penulis akan

menganalisa implikasi hukum penerapan UU Nomor 22 Tahun 2022 terhadap perkara perceraian suami yang berstatus narapidana di Pengadilan Agama Mojokerto.

Bab Ketiga, dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu permasalahan dan solusi dalam perkara perceraian suami berstatus narapidana di Pengadilan Agama Mojokerto. Bab Ketiga ini, pembahasan dibagi ke dalam dua sub bab yakni. Sub bab pertama penulis akan menguraikan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam perkara perceraian suami berstatus narapidana di Pengadilan Agama Mojokerto. Sementara itu, sub bab kedua akan membahas mengenai solusi dalam menangani permasalahan yang timbul pada perkara perceraian suami berstatus narapidana di Pengadilan Agama Mojokerto.

Bab Keempat, berisi bagian penutup yang merangkum keseluruhan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis akan menyajikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan yang telah dikaji. Selain itu, bab ini juga akan memuat saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah konsep yang merujuk pada segala solusi yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan setiap individu melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Secara sederhana, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau mekanisme yang disediakan oleh hukum untuk mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran hak atau ketidakadilan yang dialami oleh seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, yang tertulis pada jurnal Natsif (2019), perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa, tetapi juga terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

²⁷ Hukumonline.(2023).Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya. Url : <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062.com>. Diakses pada 29 Juni 2025

²⁸ Natsif, F. A. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. Jurnal Al-Risalah, 12. Hlm. 156

sesama warga negara. Dalam praktiknya, perlindungan hukum diwujudkan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan dan pengawasan, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran, biasanya melalui proses peradilan dan pemberian sanksi atau ganti rugi.²⁹

Di Indonesia, perlindungan hukum dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum juga diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang memberikan perlindungan terhadap korban atau pihak yang mengalami kerugian, misalnya melalui hak untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup bidang-bidang khusus, seperti perlindungan konsumen, perlindungan anak, perlindungan data pribadi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, yang masing-masing diatur dalam peraturan tersendiri. Untuk memperoleh

²⁹ *Ibid*

perlindungan hukum, seseorang dapat menempuh berbagai cara, seperti melaporkan tindak pidana atau pelanggaran hak kepada aparat penegak hukum, mengajukan gugatan ke pengadilan, atau memanfaatkan lembaga- lembaga bantuan hukum yang tersedia di masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negara yang hak-haknya terancam atau dilanggar. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diperoleh melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan

1.7.2 Tinjauan Umum Perkawinan

1.7.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan fisik atau formal semata, melainkan juga mengandung

ikatan batin yang mendalam, sehingga menciptakan kesatuan hidup yang harmonis dan berkelanjutan.³⁰

Perkawinan di Indonesia diatur secara ketat oleh hukum positif yang mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai budaya nasional. Salah satu prinsip utama adalah asas monogami, yaitu dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kecuali dengan izin pengadilan untuk poligami dalam kondisi tertentu. Selain itu, perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memperoleh status hukum yang sah dan diakui negara.³¹

Tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat diharapkan menjadi tempat lahirnya generasi penerus yang sehat secara fisik, mental, dan moral.³² Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan

³⁰ Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), Hlm 23

³¹ Pua, B., Karamoy, D. N., & Setlight, M. M. (2022). Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), Hlm. 2375

³² Sayyida, N. U. (2022). *Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai (Dalam Perspektif Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).Hlm. 17

biologis, tetapi juga tanggung jawab sosial dan spiritual yang melibatkan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara hukum, seperti adanya persetujuan kedua belah pihak, kemampuan untuk menikah, dan pelaksanaan menurut tata cara yang diatur oleh agama dan negara. Perkawinan yang sah memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk perlindungan hak-hak hukum dalam hal harta, nafkah, dan status anak.³³

Perkawinan juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat di Indonesia. Perkawinan dianggap sebagai fondasi masyarakat yang berfungsi menjaga kelangsungan hidup sosial, mengatur hubungan antar keluarga, serta menegakkan norma dan nilai yang berlaku dalam komunitas.³⁴ Oleh sebab itu, hukum perkawinan di Indonesia mengakomodasi berbagai adat dan agama yang beragam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara dan hak asasi manusia.

³³ Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMMPress. Hlm.8

³⁴ *Ibid*

1.7.3 Tinjauan Umum Perceraian

1.7.3.1 Pengertian Umum Perceraian

Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, sehingga mereka tidak lagi memiliki status sebagai pasangan suami istri secara hukum dan sosial. Perceraian diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tata cara, alasan, dan konsekuensi perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan setelah solusi mediasi atau perdamaian antara suami dan istri tidak berhasil, sebagai solusi untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara gegabah atau sewenang-wenang.³⁵

Terdapat dua jenis perceraian utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri melalui pengadilan. Perceraian hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan-alasan yang sah dan cukup menurut undang-undang, seperti ketidakmampuan untuk hidup rukun, adanya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran, atau kondisi lain yang menyebabkan keretakan rumah tangga secara permanen.

Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian

³⁵ Magister Hukum UMA.(2025). Info Terkait Mengenai Hukum Perceraian.Url: <https://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenai-hukum-perceraian/>. Diakses pada 29 Juni 2025

harus didasarkan pada alasan yang cukup kuat bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Beberapa alasan yang diatur dalam undang-undang dan KHI antara lain: salah satu pihak melakukan zina, menjadi pemabuk atau pecandu narkoba, melakukan kekerasan berat, meninggalkan pasangan selama dua tahun tanpa izin, mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih, atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tanpa harapan rukun kembali.³⁶

Proses perceraian di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, merupakan manifestasi dari sistem hukum yang menggabungkan antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara normatif, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak, termasuk anak-anak yang mungkin terdampak.³⁷

³⁶ *Op.Cit* Hlm. 18

³⁷ Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner. *Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1-32. Hlm. 12

Perceraian juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang cukup besar bagi pasangan dan anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, pengadilan juga mengatur tentang hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama agar tercipta keadilan dan perlindungan bagi semua pihak, terutama anak-anak yang menjadi korban perceraian. Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara perceraian bagi pasangan yang beragama Islam, termasuk menetapkan hak asuh anak dan kewajiban nafkah.³⁸

1.7.4 Hak Suami dan Istri Pasca Perceraian

1.7.4.1 Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan konsep hukum yang mengatur tentang siapa yang berhak dan bertanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak setelah terjadinya perceraian antara orang tua. Dalam perspektif hukum Indonesia, hak asuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan 156, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KHI menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) secara umum hak asuhnya jatuh kepada ibu, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih tinggal dengan ayah atau ibu sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menjadi dasar utama dalam penetapan hak asuh, yang menekankan bahwa

³⁸ *Ibid*

keputusan pengadilan harus mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak.³⁹

Asas kepentingan terbaik anak ini mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi psikologis anak, kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan, dan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak. Hakim harus berhati-hati dan cermat dalam menentukan hak asuh anak, tidak hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis, tetapi juga fakta-fakta konkret dalam persidangan. Indikator yang sering digunakan dalam pertimbangan hakim meliputi kesejahteraan anak, perilaku orang tua, koordinasi antar orang tua, serta pembagian waktu pengasuhan. Hal ini penting agar hak asuh diberikan kepada pihak yang benar-benar mampu memberikan perlindungan dan perhatian terbaik bagi anak.⁴⁰

Kewajiban memelihara dan mendidik anak tetap melekat pada kedua orang tua meskipun telah bercerai. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa baik ayah maupun ibu wajib memelihara dan mendidik anaknya, dan jika terjadi perselisihan mengenai pengasuhan, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang mengutamakan kepentingan anak. Ayah juga bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, meskipun hak

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 151-161. Hlm. 158

asuh anak diberikan kepada ibu. Meskipun KHI memberikan hak asuh anak di bawah umur 12 tahun kepada ibu, terdapat putusan pengadilan yang memberikan hak asuh kepada ayah apabila terbukti bahwa ayah lebih mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan perkembangan zaman. Hak asuh anak bukanlah hak mutlak yang melekat pada salah satu orang tua, melainkan hak yang harus diputuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak secara objektif. Jika salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajiban ini, pengadilan dapat mengatur mekanisme pengawasan dan pelaksanaan hak asuh agar tidak merugikan anak.⁴¹

Hak asuh anak dalam hukum Islam (*hadhanah*) juga menegaskan bahwa ibu memiliki hak utama atas pengasuhan anak yang masih kecil, sementara ayah bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikan. Namun, jika ibu terbukti tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang dianggap lebih mampu menjaga kepentingan terbaik anak.⁴²

1.7.4.2 Hak Atas Harta Bersama

⁴¹ pa-pelaihari.go.id. (2024). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.url : <https://pa-pelaihari.go.id/kategori-artikel/1172-hak-asuh-anak-hadhanah-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-di-indonesia.html>, diakses pada 17 Juni 2025

⁴² Mandey, T. B. A. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lex Privatum, 9(9). Hlm 4

Hak atas harta bersama merupakan konsep hukum yang mengatur pembagian kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami dan istri. Secara teori, harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan, baik melalui usaha bersama maupun usaha masing-masing pasangan, dengan pengecualian harta yang diperoleh dari warisan atau hibah yang menjadi milik pribadi. Dalam fikih muamalah, konsep ini dikenal dengan istilah syirkah atau kemitraan antara suami dan istri, yang menegaskan bahwa selama perkawinan, suami dan istri secara bersama-sama memiliki hak atas harta yang diperoleh dari usaha mereka.⁴³

Pengaturan harta bersama tercantum dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila terjadi perceraian, harta tersebut harus dibagi secara adil antara suami dan istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal serupa dengan ketentuan bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing pihak, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang harus dijaga dan dikelola bersama.⁴⁴

Teori pembagian harta bersama menekankan prinsip keadilan

⁴³ Rofiq A, (2015). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 161

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 163

dan kesetaraan, di mana pembagian harta tidak hanya didasarkan pada siapa yang secara langsung memperoleh harta tersebut, tetapi juga memperhitungkan kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, seperti pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Meskipun istri tidak bekerja di luar rumah, kontribusinya dalam mengatur dan mengelola rumah tangga dianggap sebagai bagian dari usaha bersama yang mendukung terbentuknya harta bersama.⁴⁵

Ketika pasangan suami istri bercerai, pembagian harta bersama menjadi hal yang tidak bisa diabaikan karena berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan masing-masing pihak setelah berpisah. Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama dilakukan secara proporsional dan adil, dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Dalam praktiknya, pembagian ini bisa dilakukan secara musyawarah untuk mufakat atau melalui putusan pengadilan jika terjadi perselisihan. Teori syirkah dalam hukum Islam memberikan kerangka filosofis bahwa harta bersama merupakan hasil kemitraan yang harus dipertanggungjawabkan bersama dan tidak boleh dipindahtangankan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menegaskan bahwa harta bersama adalah aset yang harus dilindungi dan dikelola secara bersama demi kepentingan

⁴⁵ Puspytasari, H. H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara*, 35(2). Hlm. 27

keluarga. apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama menjadi penting untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan kedua belah pihak, terutama bagi pihak yang mungkin mengalami kerugian ekonomi, seperti istri dan anak-anak. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dengan mempertimbangkan asas keadilan.

1.7.5 Tinjauan Umum Narapidana

1.7.5.1 Pengertian Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana berupa hilangnya kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Secara bahasa, narapidana berarti “orang hukuman” atau orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Menurut hukum positif, definisi ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.⁴⁶

Perbedaan narapidana dengan tahanan perlu dipahami. Tahanan adalah individu yang sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka atau terdakwa dan belum dinyatakan bersalah secara hukum, sehingga mereka ditahan sementara selama proses penyidikan dan persidangan

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. Url: <https://kbbi.web.id/narapidana>. Diakses pada 29 Juni 2025

berlangsung. Sedangkan narapidana adalah mereka yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan sedang menjalani hukuman pidana.⁴⁷

Narapidana bukan sekadar pelaku tindak pidana, melainkan juga manusia biasa yang menjalani proses pembinaan dan rehabilitasi agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Konsep pemasyarakatan menekankan bahwa meskipun narapidana kehilangan kebebasan fisiknya, hak-hak asasi mereka tetap harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlakuan yang manusiawi selama menjalani hukuman.

Narapidana menjalani berbagai program pembinaan di Lapas yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan meningkatkan keterampilan agar dapat reintegrasi sosial setelah masa hukuman selesai. Namun, status sebagai narapidana juga membawa berbagai keterbatasan, seperti pembatasan kebebasan bergerak dan komunikasi, yang dapat berdampak pada aspek kehidupan pribadi dan sosial mereka.⁴⁸

⁴⁷ Fahum UMSU. (2024). Perbedaan Tahanan dan Narapidana Dalam Hukum. Url: <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-tahanan-dan-narapidana-dalam-hukum/>. Diakses pada 29 Juni 2025

⁴⁸ Rachman, F. A. (2024). IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (*Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun*) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hlm. 9

1.7.5.2 Hak-Hak Narapidana

Hak-hak narapidana diatur oleh berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang bertujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi mereka. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1), menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri dan hak untuk tidak disiksa, yang juga berlaku bagi narapidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara khusus mengatur hak-hak narapidana.

Menurut Pasal 9 dan 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana berhak atas sejumlah hak yang meliputi:

1. Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, sehingga kebebasan beragama tetap dijaga meskipun dalam tahanan.
2. Hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, termasuk pelayanan kesehatan yang memadai.
3. Hak memperoleh Pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasi, dan kesempatan mengembangkan potensi yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik.
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan

yang layak sesuai standar kesehatan.

5. Hak untuk mendapatkan layanan informasi.
6. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan penyuluhan tentang hukum.
7. Hak menyampaikan keluhan atau pengaduan jika mengalami perlakuan yang tidak adil atau kondisi yang tidak layak selama masa tahanan.
8. Hak memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, untuk menjaga hak atas informasi dan kebebasan berpikir.
9. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, kekerasan, eksploitasi, pembiaran, dan segala tindakan yang membahayakan mental dan fisik.
10. Hak mendapatkan pelayanan sosial
11. Hak untuk menolak atau menerima kunjungan dari advokat, pendamping, keluarga, masyarakat.
12. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama menjalani pembinaan.
13. Hak mendapatkan remisi (pengurangan masa hukuman), asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.⁴⁹

Hak-hak tersebut harus dijalankan dengan asas persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, ras, atau faktor lainnya. Negara dan lembaga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi secara adil dan manusiawi, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Faktanya masih ditemukan berbagai tantangan dan pelanggaran terhadap hak-hak narapidana, seperti kondisi lembaga masyarakat yang overkapasitas, kurangnya fasilitas kesehatan, penyiksaan, dan pembatasan akses komunikasi yang tidak sesuai standar. Sehingga perlindungan hak narapidana menjadi isu penting yang harus terus diperbaiki untuk menjamin keadilan dan kemanusiaan dalam sistem masyarakat. Hak-hak narapidana merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara universal, meskipun seseorang telah dijatuhi pidana. Pelaksanaan hak narapidana harus selalu berdampingan dengan prinsip HAM, di mana meskipun hak kebebasan fisik mereka dirampas, hak-hak lain seperti hak kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari penyiksaan tetap harus dihormati.⁵⁰ Negara wajib memastikan bahwa institusi masyarakat tidak menjadi tempat yang mengabaikan harkat kemanusiaan para warga binaan. Hak-hak

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 dan 10 ayat 1

⁵⁰ Kristianingsih, S. A. (2021). Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga). Hlm 19

narapidana dapat dipahami melalui teori hak kodrati yang menyatakan bahwa hak-hak dasar melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh negara. Teori ini menegaskan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh narapidana tidak otomatis menghapus hak-hak kodratinya sebagai manusia.⁵¹

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana memberikan rincian lebih lanjut mengenai hak-hak tersebut, termasuk hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan hak untuk bekerja. Di tingkat internasional, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menegaskan hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk tidak disiksa dan hak atas perlakuan yang manusiawi. Selain itu, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) juga mengatur perlindungan terhadap individu dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan.⁵²

⁵¹ Yufita, I. D. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibunya. Repository UNSRI. Hlm. 21

⁵² Marwan, S. M. A. (2021). Eksistensi pidana penjara seumur hidup di Indonesia ditinjau dalam perspektif tujuan hukum pidana modern. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 13(1). Hlm. 150

1.7.6 Tinjauan Umum Teori Keadilan

1.7.6.1 Pengertian Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice" merupakan salah satu kontribusi paling signifikan dalam pemikiran politik dan etika modern. Rawls berargumen bahwa keadilan harus dipahami sebagai fairness, yang berarti bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam masyarakat. Dalam kerangka teorinya, Rawls memperkenalkan dua prinsip utama yang menjadi landasan bagi keadilan sosial: prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan.⁵³

Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan dasar yang sama (*equal basic liberties*), yang menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki hak dan kebebasan dasar yang sama, seperti kebebasan berbicara, beragama, hak memilih, dan kebebasan politik lainnya. Kebebasan ini bersifat mutlak dan tidak boleh dikurangi demi alasan apa pun, sehingga semua orang menikmati hak-hak ini secara setara tanpa diskriminasi.⁵⁴

Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan (*difference principle*), yang mengizinkan adanya ketidaksetaraan dalam

⁵³ Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2021). A review on Rawls Theory of Justice. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 29-36. Hlm. 30

⁵⁴ *Ibid*

distribusi kekayaan, pendapatan, dan posisi sosial, asalkan ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika hal itu memperbaiki keadaan mereka yang paling membutuhkan. Prinsip ini juga menuntut adanya⁵⁵ kesetaraan kesempatan (*fair equality of opportunity*), yaitu bahwa semua orang harus memiliki peluang yang sama untuk mengakses posisi dan jabatan penting tanpa permasalahan diskriminatif.

Rawls juga mengusulkan konsep "*veil of ignorance*" atau tirai ketidaktahuan sebagai alat untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Dalam skenario ini, individu diminta untuk merancang masyarakat tanpa mengetahui posisi mereka sendiri dalam masyarakat tersebut, termasuk status sosial, ekonomi, atau hukum mereka. Dengan cara ini, individu akan cenderung memilih prinsip-prinsip yang adil dan setara, karena mereka tidak ingin mengambil risiko menjadi salah satu yang paling tidak beruntung.

Penerapan teori Rawls sangat relevan. meskipun narapidana telah melanggar hukum, mereka tetap merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak-hak dasar yang

⁵⁵ STIH Adhyaksa. (2023). Justice as Fairness: Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls. Url : <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>. Jakarta.. Diakses pada tanggal 29 Juni 2025

harus dihormati. Rawls berpendapat bahwa dalam merancang sistem hukum dan kebijakan, kita harus mempertimbangkan posisi paling tidak beruntung.⁵⁶ Dalam hal ini adalah narapidana yang terjebak dalam sistem peradilan. Proses perceraian bagi narapidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka tidak kehilangan hak-hak mereka hanya karena status mereka sebagai pelanggar hukum. Misalnya, akses terhadap pengacara, informasi mengenai proses hukum, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam sidang perceraian harus dijamin, sehingga narapidana dapat menjalani proses tersebut dengan adil dan setara.

⁵⁶ Munawaroh N. (2020). 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli.url:<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum/t62e268cc4bb9b/>. Diakses pada 1 Mei 2025